

BAB I

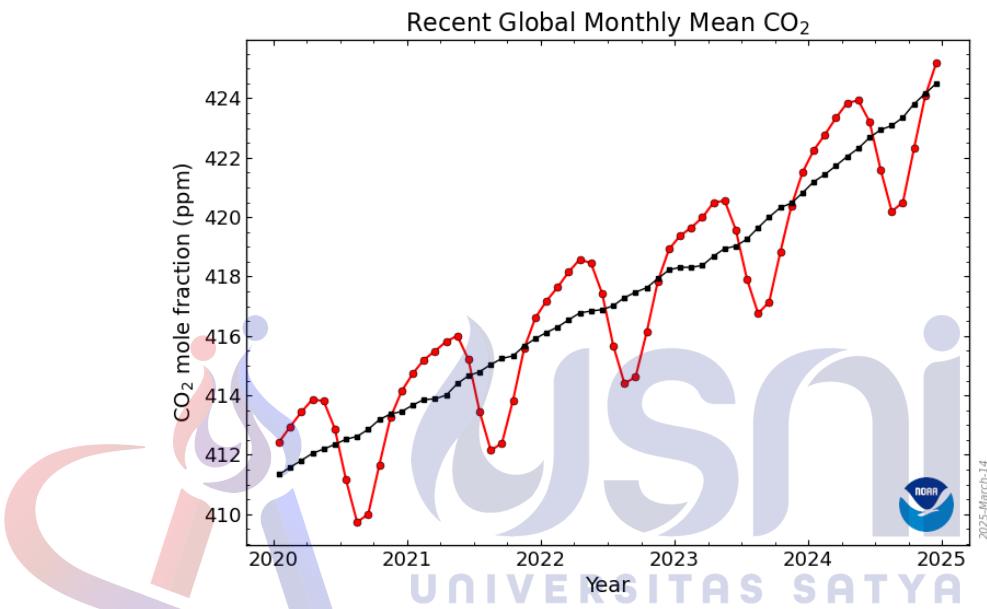
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim menjadi persoalan yang mengancam dunia pada masa yang akan datang, maka harus adanya tindakan pencegahan (Wirawan & Setijaningsih, 2022). Sumber dominan perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca (GRK) atau emisi karbon seperti CO₂, yang sebagian besar berasal dari kegiatan operasional manusia yang meliputi pembakaran bahan bakar fosil, pembuatan semen, penggundulan hutan, dan pertanian (Zulkarnaen & Darmawati, 2025). Menurut (Ecolife, 2025), emisi karbon adalah pada proses pelepasan senyawa berbasis karbon, seperti karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄), ke udara. Senyawa-senyawa ini berfungsi sebagai gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memiliki korelasi langsung dengan meningkatnya kadar CO₂ di atmosfer serta mempercepat laju pemanasan global.

Kenaikan kadar GRK yang mengindikasikan terjadinya perubahan iklim umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia, sektor industri, serta proses alami (BMKG, 2022). Hal ini dapat diidentifikasi melalui indeks tahunan yang diperoleh dari NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*), yaitu *Annual Greenhouse Gas Index* (AGGI). Indeks ini mengukur kombinasi pengaruh dari GRK berumur panjang yang paling penting seperti Karbon dioksida (CO₂), Metana (CH₄), Nitrous dioksida (N₂O), dan unsur kimia lain dalam proses pendinginan lainnya (BMKG, 2022).

Gambar 1.1 menampilkan konsentrasi global rata-rata bulanan CO₂, selama periode 2020 hingga 2025, kadar CO₂ di atmosfer mengalami peningkatan dengan tingkat terakhir yang terpantau pada 2024 mencapai 425,19 ppm.



Gambar 1.1 Rata-rata bulanan gas CO₂ global (ppm) 2020 – 2025

Sumber: (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2025)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (IDX Channel, 2023), menyatakan bahwa sektor energi dan manufaktur menjadi kontributor utama emisi karbon di Indonesia karena keduanya bergantung pada sumber energi berbasis fosil dan proses industri yang menghasilkan emisi langsung dalam jumlah besar. Aktivitas pada sektor ini tidak hanya memperburuk kondisi lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap biaya pembiayaan dan nilai saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya wajib bagi perusahaan berpartisipasi dalam meminimalisir emisi sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap publik dan investor (Ramdani & Nugraha, 2024).

Menanggapi fenomena lingkungan tersebut, mendorong adanya regulasi internasional dan nasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian (Putri Halimah & Yanto, 2018), untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia melakukan ratifikasi Protokol Kyoto pertama dengan mengeluarkan UU RI No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* dan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK). Pengungkapan lingkungan juga didorong oleh PSAK No. 1 (revisi 2009), yang mendorong perusahaan, terutama sektor dengan dampak lingkungan tinggi, untuk menyajikan laporan keberlanjutan (Purnayudha et al., 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) berperan serta dalam upaya menurunkan emisi karbon. Regulasi pemerintah dan tekanan dari pemangku kepentingan mendorong transparansi dampak lingkungan perusahaan. Namun di Indonesia pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela, dengan alasan karena tingginya biaya operasional dan kekhawatiran terhadap dampak negatif pada nilai saham, reputasi perusahaan, hukum atau regulasi, serta denda dan pinalti (Dewi et al., 2019), sehingga perusahaan tidak diwajibkan melaporkannya secara terbuka dan komprehensif.

Dalam laporan keberlanjutan PT. MNC Energy Investments Tbk. tahun 2024, perusahaan tersebut mendapatkan peringkat PROPER yaitu Biru, padahal di dalam PROPER juga terdapat penilaian terkait emisi, sedangkan pelaporan

emisi yang dilakukan perusahaan masih tergolong belum transparan dan luas sesuai dengan standar GRI 305. Dalam kasus lain, PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. tahun 2024 memiliki peringkat PROPER yaitu Emas dan pelaporan emisi karbon yang dapat diungkapkan selaras dengan standar GRI 305 dalam *scope 1* sampai dengan *scope 7*. Hal ini merupakan fenomena dalam pelaporan emisi karbon suatu perusahaan yang belum konsisten korelasinya antara peringkat PROPER tinggi dengan pelaporan emisi karbon yang dapat diungkapkan perusahaan.

Dampak dari pengungkapan yang masih seperti hal tersebut yaitu, perusahaan terkesan tidak serius dalam menanggapi isu lingkungan, menyulitkan investor dalam menilai dan membedakan efektivitas kinerja lingkungan antar perusahaan, menimbulkan kecurigaan pada perusahaan yang tidak melaporkan mungkin sedang menutupi kinerja lingkungan yang buruk, memunculkan risiko greenwashing, berpotensi kehilangan investasi hijau dari ESG-*minded*, serta menurunnya nilai perusahaan di mata investor institusional (Dewi et al., 2019).

Fenomena ini menjadi semakin relevan untuk dikaji, mengingat wacana pengenaan pajak karbon yang menuntut transparansi emisi korporasi kini terus berkembang. Dengan mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait dampak lingkungan, baik dalam laporan keuangan maupun laporan non-keuangan, pengungkapan emisi karbon meningkatkan transparansi perusahaan kepada para *stakeholder*. Tanggapan positif dari investor dan calon investor terhadap praktik ini dalam laporan tahunan dan keberlanjutan menjadi bukti

bahwa pengungkapan emisi karbon tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga berpengaruh pada persepsi publik terhadap perusahaan (Fitriana et al., 2024).

Maka dari itu, seharusnya perusahaan menerapkan ESG dalam kegiatan operasional perusahaan demi keberlangsungan usaha, terlebih menjadi pertimbangan bagi para investor dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan (Anggraini & Sari, 2024). ESG terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu *Environmental*, *Social*, dan *Governance*. Namun dari ketiga aspek tersebut, dalam penelitian ini hanya menekankan aspek *Environmental* dan *Governance*.

Aspek *environmental* (lingkungan) mencakup pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan upaya pengurangan emisi. Komitmen terhadap lingkungan yang baik dapat meningkatkan citra serta legitimasi perusahaan dan menarik investor (Manulang & Soeratin, 2024). Maka dari itu, perusahaan seharusnya tidak hanya berfokus pada keuntungan (*profit*), tetapi juga memperhatikan aspek sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) yang merupakan prinsip *Triple Bottom Line* (Latifah, 2020). Salah satu pengukuran pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya yaitu kinerja lingkungan (Purnayudha et al., 2022).

Menurut (Walls et al., 2011), kinerja lingkungan atau CEP (*Corporate Environmental Performance*) merupakan hasil dari strategi pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari operasi perusahaan. Kinerja lingkungan, yang diukur melalui PROPER dari KLHK (Cahyani & Puspitasari, 2023). Program ini memberikan peringkat terhadap

pengelolaan lingkungan perusahaan. Semakin tinggi peringkat PROPER, maka semakin baik citra dan legitimasi perusahaan di mata masyarakat dan *stakeholder* (Pratika, 2025). Hal ini selaras dengan teori legitimasi, perusahaan perlu menjalankan tanggung jawab sosial agar memperoleh dukungan masyarakat, terutama ketika aktivitasnya berdampak pada lingkungan sekitar (Amaliyah & Solikhah, 2019). Jika kinerja lingkungannya baik berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon perusahaan. Didukung oleh penelitian (Prasetya & Yulianto, 2018) bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan (Amaliyah & Solikhah, 2019) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Selain itu, menurut penelitian (Doan & Sassen, 2020) yang menyatakan bahwa CEP (*Corporate Environmental Performance*) dengan CER (*Corporate Environmental Reporting*) memiliki hubungan yang lemah dan negatif menyimpulkan bahwa pengungkapan bukan merupakan indikasi kinerja.

Pengungkapan emisi karbon suatu perusahaan tidak semata-mata berfokus pada kinerja lingkungannya saja. Namun adanya salah satu aspek dalam ESG yaitu aspek *governance* (tata kelola) yang mengacu pada struktur dan praktik manajerial perusahaan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan (Manulang & Soeratin, 2024). Hal ini selaras dengan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang melibatkan prosedur yang jelas untuk menghubungkan pengambil keputusan dengan pihak yang bertanggung jawab

atas pengawasan dan kontrol (Jensen & Meckling, 1976). Penerapan GCG menjadi alat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Salah satu bentuk implementasi GCG yang banyak diteliti adalah kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional artinya kepemilikan saham dari institusi dalam seluruh saham perusahaan yang beredar (Amaliyah & Solikhah, 2019). Pemegang saham mayoritas seperti investor institusi memiliki otoritas besar dibanding pemegang saham minoritas seperti investor individu dalam mendorong perusahaan terkait dengan kinerja serta pengungkapannya, hal ini terjadi karena pemegang saham minoritas memiliki keterbatasan informasi perusahaan yang hanya dapat diakses oleh pemegang saham mayoritas (Putri Halimah & Yanto, 2018). Kepemilikan institusional yang besar diyakini mampu memperkuat pengawasan terhadap manajemen dan mendorong keterbukaan informasi, termasuk pengungkapan emisi karbon (Hermawan et al., 2018). Pemangku kepentingan mempunyai urgensi dalam perusahaan sehingga mendorong adanya evaluasi (Wiransyah et al., 2024). Didukung penelitian (Amaliyah & Solikhah, 2019), semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan memperlihatkan hak suara yang besar bagi investor institusi perusahaan dalam pengungkapan emisi karbon. Tingginya kepemilikan institusional berbanding lurus dengan pengungkapan emisi karbon, dimana investor institusional mendorong transparansi perusahaan sekaligus mengawasi untuk memenuhi ekspektasi para *stakeholder* lainnya (Zulkarnaen & Darmawati, 2025).

Terlebih lagi menurut (Stiadi, 2023) umumnya investor lebih tertarik berinvestasi di perusahaan dengan praktik ESG yang kuat karena dianggap menurunkan risiko emisi karbon. Didorong penelitian (Salsabilla et al., 2024) kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun bertentangan dengan penelitian (Putri et al., 2022) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Serta pada penelitian (Hermawan et al., 2018) ternyata menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Selain kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi juga berperan penting sebagai konteks *governance*. *Board size* adalah variabel yang menyatakan proporsi anggota dewan yang ada di dalam sebuah perusahaan (Herlina & Juliarto, 2019). Dalam teori keagenan (*agency theory*) melibatkan pertukaran sosial, peran, dan hubungan antar individu yang saling bergantung (Wiransyah et al., 2024). Dalam menjaga kinerja manajemen dan GCG, maka diperlukan dewan komisaris yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, direksi, ataupun dewan lainnya. Namun adanya penelitian (Mardiya & Sohandina, 2024) yang menyatakan bahwa ukuran dewan yang tinggi akan menimbulkan pengambilan keputusan menjadi tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang terjadi antara pemilik entitas dengan manajer. Tetapi menurut (Novtaviani, 2021), dewan yang lebih besar juga lebih mengacu pada variasi keterampilan dan pengalaman yang lebih luas, ini mengarah pada pengambilan keputusan dan

pemantauan perusahaan yang lebih baik dibanding dewan yang lebih sedikit. Pada penelitian (Simamora et al., 2022) mengungkap bahwa ukuran dewan direksi perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Didukung dengan penelitian (Oyewo, 2023), jika jumlah dewan semakin tinggi, maka akan mendorong terjadinya upaya pengungkapan emisi karbon dalam perusahaan tersebut sebagai bukti nyata perusahaan untuk memuaskan para pemangku kepentingan dan mendapatkan legitimasi masyarakat. Namun, bertentangan dengan penelitian (Amaliyah & Solikhah, 2019) bahwa *board size* (ukuran dewan) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Karena hasil penelitian terkait struktur dewan masih belum konsisten, maka perlu ada penelitian lebih lanjut. Selain ukuran dewan, adapun keberagaman gender dalam struktur dewan yang tidak hanya mengacu pada GCG tetapi juga mendorong pencapaian tujuan ESG terutama dalam peningkatan transparansi dan keputusan strategi, karena memiliki karakteristik yang berbeda antara dewan wanita dan dewan pria. *Gender Diversity* sendiri diartikan dalam penelitian (Gonenc & Krasnikova, 2022) mengacu pada representasi perempuan dalam dewan suatu perusahaan. Menurut (Ma'wa & Setiawan, 2024), semakin banyak wanita yang menjadi dewan, maka semakin tinggi pula praktik pengungkapan informasi mengenai risiko terkait perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca, karena secara psikologis dewan wanita cenderung memakai perasaan untuk mempertimbangkan suatu hal (Kristanto & Lasdi, 2022). Menurut penelitian (Zulkarnaen & Darmawati, 2025) dinyatakan bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Namun menurut (Gonenc & Krasnikova, 2022), *gender diversity* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor lain yang mendorong pengungkapan emisi karbon yaitu investasi hijau, karena investasi hijau berfungsi sebagai alat penting untuk meminimalisir emisi karbon dengan cara melakukan penanggulangan emisi gas rumah kaca (Afni et al., 2018). Investasi hijau mencerminkan dukungan pembiayaan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperkuat untuk penerapan ESG. Seharusnya jika adanya investasi hijau, menjadi acuan perusahaan untuk pengungkapan emisi karbon. Namun, pada penelitian (Zulkarnaen & Darmawati, 2025), dijelaskan bahwa investasi hijau tidak dapat memperkuat pengaruh dengan korelasi antara pengungkapan emisi karbon maupun variabel independen lainnya. Namun bertentangan dengan penelitian (Syabilla et al., 2021) bahwa investasi hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon disertai dengan beberapa *research gap* terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam pengembangan praktik bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi regulator, perusahaan, dan investor dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim serta memenuhi regulasi terkait pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini memiliki kekuatan dan keunikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan empat variabel utama, yaitu

kinerja lingkungan, kepemilikan institusional, ukuran dewan, dan *gender diversity* dalam menganalisis pengungkapan emisi karbon, serta menghadirkan investasi hijau sebagai variabel moderasi yang masih jarang dikaji secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi dan manufaktur di Indonesia periode 2020–2024, yang merupakan kontributor utama emisi karbon. Penelitian ini juga memperkuat urgensi keterbukaan informasi lingkungan di tengah pengungkapan emisi karbon yang masih bersifat sukarela di Indonesia, serta merespons inkonsistensi temuan sebelumnya mengenai hubungan antara ESG, GCG dan pengungkapan emisi karbon. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan empiris, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dalam mendorong praktik bisnis yang lebih transparansi dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional, Board Size, dan Gender Diversity Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon dengan Investasi Hijau sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Energi dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah *board size* (ukuran dewan) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
4. Apakah *gender diversity* (keberagaman gender) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
5. Apakah investasi hijau memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon?
6. Apakah investasi hijau memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon?
7. Apakah investasi hijau memoderasi pengaruh *board size* (ukuran dewan) terhadap pengungkapan emisi karbon?
8. Apakah investasi hijau memoderasi pengaruh *gender diversity* (keberagaman gender) terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Untuk memahami pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon.

3. Untuk memahami pengaruh *board size* (ukuran dewan) terhadap pengungkapan emisi karbon.
4. Untuk memahami pengaruh *gender diversity* (keberagaman gender) terhadap pengungkapan emisi karbon.
5. Untuk memahami investasi hijau dalam memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.
6. Untuk memahami investasi hijau dalam memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon.
7. Untuk memahami investasi hijau dalam memoderasi pengaruh *board size* (ukuran dewan) terhadap pengungkapan emisi karbon.
8. Untuk memahami investasi hijau dalam memoderasi pengaruh *gender diversity* (keberagaman gender) terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.3.2 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan peneliti untuk berpikir kritis tentang bagaimana kinerja lingkungan, kepemilikan institusional, *board size*, dan *gender diversity* memengaruhi pengungkapan emisi karbon dengan mempertimbangkan investasi hijau sebagai faktor moderasi

pada perusahaan sektor energi dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024 serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi yang sedang ditempuh.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada pembaca dan dapat dijadikan sebagai literatur atau referensi bagi peneliti selanjutnya dengan objek yang sama ataupun serupa.

3. Bagi Perusahaan dan Investor

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan dalam mencapai aspek lingkungan yang aman dan hijau, sosial yang adil, serta tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan transparansi informasi perusahaan. Bagi investor, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Dan diharapkan menjadi sarana informasi tambahan pertimbangan bagi para investor.